BPR PERDHANA
PT. BPR PERMATA DHANAWIRA

LAPORAN TRANSPARANSI PELAKSANAAN TATA KELOLA BPR TAHUN 2024

KANTOR PUSAT
Jl. Jamika No. 120, Bandung
Tlp : 022 - 6125 600

KANTOR CABANG
Ruko Padayungan No. 10,
Jl. Perintis Kemerdekaan, Tasikmalaya
Tlp : 0265 - 2354 922

A. RINGKASAN HASIL PENILAIAN (*SELF ASSESSMENT*) ATAS PENERAPAN TATA KELOLA

Alamat	Jl. Jamika no 120, Bandung
Nomor Telepon	(022)6125600
Penjelasan Umum	Komisaris sebagai pemegang saham berkomitmen untuk mendukung perkembangan BPR dalam hal perencanaan permodalan untuk menghadapi penerapan penghitungan CKPN di awal Januari 2025 dengan melakukan penambahan setoran modal di bulan Agustus sebesar Rp 2,5 Miliar dan sedang menunggu persetujuan dari OJK. Anggota Direksi yang menjabat hanya bekerja di BPR Permata Dhanawira sehingga dapat fokus untuk mengelola BPR serta mencapai goal, tujuan perusahaan dan stakeholder. BPR menerapkan prinsip Transparansi dimana BPR menyampaikan laporan bulanan secara berkala sesuai dengan kondisi yang sebenarnya kepada OJK melalui Apolo, melibatkan Dewan Komisaris dan Direksi dalam hal pengambilan keputusan yang strategis dan dibuatkan notulen rapat, menerapkan prinsip akuntabilitas dimana pemenuhan struktur organisasi BPR pada tahun 2024 sudah cukup memadai sehingga terdapat kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggung jawaban organ BPR sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif, menerapkan prinsip responsibility dimana dalam kegiatan operasional BPR sesuai dengan peraturan OJK dan perundang-undangan dan pengelolaan BPR yang sehat, dan menerapkan prinsip independensi dimana dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab Dekom, Direksi, dan seluruh organ BPR bebas dari intervensi tanpa tekanan dari pihak manapun, serta menerapkan prinsip fairnes dimana BPR menerapkan prinsip perlakuan yang adil setara dan tidak diskriminatif. BPR telah mempunyai susunan pengurusan yang lengkap yaitu memiliki 1 Komisaris Utama, 1 Komisaris, 1 Direktur Utama yang membawahkan fungsi kepatuhan, dan 1 Direktur bisnis.
Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Tata Kelola	2 (Baik)
Penjelasan Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Tata Kelola	Susunan pengurus lengkap, Direksi dan Dekom dapat membuat keputusan strategis supaya BPR dapat mencapai sasaran dan tujuan yang akan dicapai. Benturan Kepentingan dapat diminimalisasir dengan komunikasi serta kesadaran akan ketentuan dan peraturan. Fungsi Kepatuhan terus direview dan dikinikan melalui kebijakan dan prosedur, SK-Dir. Fungsi audit internal sudah mulai meningkatkan frekuensi dan kualitas metode pemeriksaannya sehingga dapat meminimalkan temuan yang ada. Fungsi Manajemen Risiko telah menjalankan fungsinya dengan memitigasi risiko Bank. Mulai Semester ke 2 tahun 2022 BPR telah melaporkan 4 Risiko yaitu Risiko Kredit, Risiko Operasional, Risiko Kepatuhan, ditambahkan dengan Risiko Likuiditas. Kebijakan dan prosedur tentang BMPK telah dituangkan dalam ketentuan internal yaitu SK Dir, dalam pedoman dan kebijakan perkreditan serta SOP kredit yang selalu dilakukan pengkinian sehingga tidak terjadi pelanggaran maupun pelampauan BMPK. Penyusunan RBB telah sesuai POJK terbaru, di mana aspek utamanya adalah rencana target dan realisasi dalam hal pencapaian bisnis BPR, evaluasi realisasi tahun sebelumnya serta action plan penanganan kendala atau masalah untuk

diperbaiki ke RBB tahun selanjutnya. Laporan keuangan tahunan setelah diaudit oleh KAP, laporan bulanan dan triwulanan dikirimkan tepat waktu ke OJK sesuai transparansi kondisi keuangan BPR . Terdapat pergantian CBS baru yang efektif per tanggal 1 Mei 2022 menambah keakuratan dan kecepatan proses pengolahan data pada Sistem Informasi Manajemen untuk membuat Laporan Bank kepada OJK dan Otoritas lain serta kepada Stakeholder. Mulai pelaporan penerapan Tata Kelola tahun 2024 telah ditambahkan asessment 1 pilar/faktor baru yaitu aspek pemegang saham yang memperoleh hak dan menjalankan fungsi dalam mendukung terlaksananya kegiatan usaha dan pengelolaan BPR yang sehat, berdaya saing, serta sesuai prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko.

B. PENGUNGKAPAN PENERAPAN TATA KELOLA

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi		
1.	Nama	:	Diana Feronika Sandjaja
	Jabatan	:	Direktur Utama Yang Membawahi Fungsi Kepatuhan
	Tugas dan Tanggung Jawab	:	1. Mempertanggung jawabkan kepengurusannya dalam RUPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku terutama dalam perannya sebagai Direktur Utama dan Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan. 2. Membuat Rencana Bisnis Bank dan menjalankan serta mengevaluasi hasil rencana kerja. 3. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari PE Audit Intern, Audit Eksternal, dan hasil pengawasan Dekom dan OJK. 4. Menetapkan kebijakan Penerapan Tata Kelola, Kepatuhan, Manajemen Risiko, APU PPT dan Perlindungan Konsumen 5. Melakukan tugas, tanggungjawab, dan wewenang dengan itikad baik dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian
2.	Nama	:	Candra Purnama
	Jabatan	:	Direktur Bisnis
	Tugas dan Tanggung Jawab	:	1. Mempertanggung jawabkan kepengurusannya dalam RUPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Membuat Rencana Bisnis Bank dan menjalankan serta mengevaluasi hasil rencana kerja. 3. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari PE Audit Intern, Audit Eksternal, dan hasil pengawasan Dekom dan OJK. 4. Menetapkan kebijakan Penerapan Tata Kelola, Kepatuhan, Manajemen Risiko, APU PPT dan Perlindungan Konsumen 5. Melakukan tugas, tanggungjawab, dan wewenang dengan itikad baik dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris		
1.	Nama	:	Hans Yanuar Gunawan
	Jabatan	:	Komisaris Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab	:	1. Melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada Direksi untuk memastikan bahwa BPR telah melaksanakan Tata Kelola yang baik. 2. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR. 3. Mengambil keputusan mengenai penyediaan dana kepada pihak Terkait dan hal-hal lain yang ditetapkan peraturan perundang-undangan namun tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional. 4. Melakukan review atas suatu transaksi dalam rangka pelaksanaan pengawasan. 5. Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi PE Audit Intern , Auditor Eksternal dan hasil pengawasan OJK 6. Melakukan tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk kepentingan BPR dengan itikad baik dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian
2.	Nama	:	Herry
	Jabatan	:	Komisaris
	Tugas dan Tanggung Jawab	:	1. Melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada Direksi untuk memastikan bahwa BPR telah melaksanakan Tata Kelola yang baik. 2. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR. 3. Mengambil keputusan mengenai penyediaan dana kepada pihak Terkait dan hal-hal lain yang ditetapkan peraturan perundang-undangan namun tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional. 4. Melakukan review atas suatu transaksi dalam rangka pelaksanaan pengawasan. 5. Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi PE Audit Intern , Auditor Eksternal dan hasil pengawasan OJK 6. Melakukan tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk kepentingan BPR dengan itikad baik dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian

3. Pejabat Eksekutif

Nama dan Jabatan Pejabat Eksekutif					
1.	Nama	: Melisa Chandra	4.	Nama	: Daddy Apriandi
	Jabatan	: PE Kepala Bisnis		Jabatan	: PE Audit Internal
2.	Nama	: Nelly Sonia	5.	Nama	: Adi Suryadi
	Jabatan	: Pemimpin Cabang		Jabatan	: PE Kepatuhan, MR, dan APU PPT
3.	Nama	: Marthin William	6.	Nama	: Robby Darmansyah
	Jabatan	: PE Kepala Operasional		Jabatan	: PE IT

C. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKSI, ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN PEMEGANG SAHAM PADA KELOMPOK USAHA BPR

Tidak ada kepemilikan saham anggota direksi maupun Dekom pada Kelompok Usaha BPR

D. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PADA PERUSAHAAN LAIN

Masing-masing anggota dewan komisaris mempunyai saham pada perusahaan lain yaitu PT. Harmoni Nuansa Indah dan PT. Harmoni Anugerah Mulia. Anggota Direksi tidak mempunyai saham pada perusahan lain,

E. HUBUNGAN KEUANGAN DAN HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PADA BPR

Masing-masing anggota direksi tidak mempunyai hubungan keuangan maupun hubungan keluarga dengan anggota direksi lain maupun dengan pemegang saham yang juga sebagai anggota Dewan Komisaris. Sedangkan anggota Dewan Komisaris saling mempunyai hubungan keuangan dalam hal kepemilikan saham pada PT. Harmoni Nuansa Indah dan PT. Harmoni Anugerah Mulia, namun anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga baik dengan sesama anggota Dewan Komisaris lain maupun dengan Anggota Direksi

F. RASIO GAJI TERTINGGI DAN GAJI TERENDAH

Rasio gaji tertinggi dan gaji terendah dalam perbandingan

Keterangan	Perbandingan
	a/b
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	1.85
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1.65
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (b)	2.9
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji Pegawai yang tertinggi (b)	2.9

G. PELAKSANAAN RAPAT DEWAN KOMISARIS DALAM 1 (SATU) TAHUN

No.	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta
1.	25/04/2024	2
2.	23/07/2024	2
3.	24/09/2024	2
4.	19/11/2024	2

H. KEHADIRAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

No.	Nama Anggota Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
		Fisik	Telekonferensi	
1.	Herry	4	-	100
2.	Hans Yanuar Gunawan	4	-	100

I. JUMLAH PENYIMPANGAN INTERNAL (INTERNAL FRAUD)

Tidak terdapat penyimpangan internal atau Fraud yang sedang dihadapi ataupun yang telah selesai pada Tahun 2024

J. PERMASALAHAN HUKUM YANG DIHADAPI

Tidak terdapat permasalahan hukum yang sedang dihadapi maupun yang telah selesai pada Tahun 2024

K. TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN

Tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan.